

DINAMIKA

Jepang intervensi pasar valas

TOKYO: Pemerintah Jepang mengintervensi pasar valuta asing untuk pertama kalinya sejak 2004 guna mengatasi apresiasi kurs yen terhadap dolar AS yang telah mencapai level terkuat dalam 15 tahun terakhir.

Menteri Keuangan Jepang Yoshihiko Noda mengungkapkan pemerintah telah menginformasikan langkah intervensi kepada sejumlah negara lain. Sekretaris Utama Kabinet Jepang Yoshito Sengoku menjelaskan Depkeu mempertimbangkan kurs yen di 82 per dolar AS sebagai batas pertahanan, setelah menyentuh level terkuat 82,88 kemarin.

Jepang belum melakukan intervensi mata uang melalui penjualan yen di pasar valas sejak 2004 ketika kursnya pada waktu itu berkisar 109 per dolar AS. Bank sentral Jepang (Bank of Japan, BoA) yang bertindak atas perintah Depkeu menjual 14,8 triliun yen pada kuartal I/2004. (BLOOMBERG/DEA)

Investasi di China melonjak

TAIPEI: Investasi asing langsung (*foreign direct investment*/FDI) di China pada Agustus meningkat untuk bulan ke-13 dan begitu juga secara kumulatif selama 8 bulan pertama tahun ini yang melonjak hingga 18,1%.

Departemen Perdagangan China mencatat nilai FDI selama Agustus naik 1,4% dibandingkan dengan bulan yang sama tahun lalu (*year-on-year*) menjadi US\$7,6 miliar. FDI untuk periode 8 bulan pertama tahun ini meningkat sebesar 18,1% hingga menyentuh US\$65,96 miliar.

Laporan PBB yang dirilis pekan lalu memperkirakan negeri berpenduduk terbesar dunia itu akan menjadi destinasi utama bagi FDI global hingga akhir 2012. (BLOOMBERG/DEA)

Orix ekspansi ke pasar Asia

TOKYO: Orix Corp, perusahaan leasing peralatan terbesar di Jepang yang juga bergerak di bisnis perbankan, real estat dan broker, berencana melakukan ekspansi aset luar negeri di Asia sebesar 12% pada tahun ini.

Chief Financial Officer perusahaan itu Haruyuki Urata menyebutkan perusahaan akan menghabiskan dana US\$1,2 miliar (100 miliar yen) untuk menambah peralatan untuk di-leasing. Selain itu, sebagian dana akan dipakai untuk meningkatkan saham di perusahaan luar negeri menjadi sekitar 960 miliar yen sebelum Maret 2011 dari 860 miliar yen pada tahun fiskal sebelumnya.

"Kami akan meningkatkan penjualan di China, India, Malaysia dan Indonesia. China adalah pasar utama kami. Intinya, kami perlu menggolokkan diri dengan lebih cepat," tambah Urata, kemarin. (BLOOMBERG/DEA)

Lembaga asing bebas BPHTB

OLEH AHMAD ARIS
Bisnis Indonesia

JAKARTA: Pemerintah telah menetapkan badan atau perwakilan lembaga internasional yang dibebaskan dari pengenaan bea perolehan hak atas tanah (BPHTB) dan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2).

Ketentuan itu diatur dalam dua peraturan Menteri Keuangan (PMK) tertanggal 27 Agustus 2010 masing-masing PMK No. 147/PMK.07/2010 dan PMK No. 148/PMK.07/2010.

Pembebasan pengenaan BPHTB dan PBB P2 tersebut merujuk pada UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang memang memberikan kewenangan bagi Menteri Keuangan untuk menetapkan badan atau perwakilan lembaga internasional yang dibebaskan dari pengenaan dua jenis pajak tersebut.

Hanya saja, ada persyaratan yang harus dipenuhi bagi badan atau perwakilan asing yang dibebaskan dari pengenaan BPHTB dan PBB P2 yaitu badan atau perwakilan lembaga internasional tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut.

Daftar lembaga

Daftar badan atau perwakilan asing yang bebas dari pengenaan BPHTB adalah pertama, badan-badan internasional dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu Asian Development Bank (ADB), International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), International Development Association (IDA), International Finance Corporation (IFC), IJDF, International Monetary Fund

(IMF), United Nations Development Programme (UNDP), Food and Agriculture Organization (FAO), International Labour Organization (ILO), United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), United Nations Information Centre (UNIC), United Nations Children's Fund (Unicef), United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), World Health Organization (WHO).

Kedua, kerja sama bilateral, yaitu kerja sama teknis RI-Belanda, kerja sama teknis RI-Rusia, kerja sama teknik RI-Jerman Barat, kerja sama teknik RI-Polandia.

Juga kerja sama teknis RI-Prancis, kerja sama teknis RI-AS, kerja sama teknik RI-Swiss, kerja sama teknik RI-Italia, kerja sama teknik RI-Belgia, kerja sama teknik RI-Denmark, kerja sama teknik RI-Korea Selatan, dan kerja sama teknik RI-Finlandia.

Ketiga, Colombo Plan yaitu Colombo plan Australia, Colombo Plan Kanada, Colombo Plan India, Colombo Plan Jepang, Colombo Plan Selandia Baru, dan IPECC (Pakistan-RI).

Keempat, Kerja sama kebudayaan yaitu Kerja sama kebudayaan RI-Belanda, RI-Jepang, RI-Mesir, dan RI-Austria.

Kelima, organisasi-organisasi asing dan lainnya a.l. Sekretariat Asean, ECC, SEAMEO, The Export-Import Bank of Japan, AREMTRC, NORAD, FPP Int., PCI, Danish Save The Children Organization, IDRC, World Wild Federation (WWF), The Population Council, NLRA, dan MCC.

Swasta internasional seperti Asian Foundation, The British Council, CARE, CCF, dan OXFAM.

GAGASAN ELLWOOD:

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (*tengah*) menyaksikan Wapres Boediono menjabat tangan David T. Ellwood, Dekan Harvard Kennedy School, John F. Kennedy School of Government pada acara *presidential lecture* di Istana Negara, kemarin. Kuliah bertema *Creating Job, Reducing Poverty and Improving the Welfare of the People* itu, dihadiri sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu II dan sejumlah penusaha. Dalam kuliahnya Ellwood menjelaskan sejumlah gagasan untuk menciptakan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan.



RUMGAPRES/ABROR RIZKI

Konsolidasi fiskal dorong krisis ulang

PBB: Pemulihan ekonomi global masih rapuh

OLEH DEWI ASTUTI
Bisnis Indonesia

JAKARTA: PBB mengingatkan langkah konsolidasi fiskal yang prematur berisiko menjerumuskan ekonomi dunia kembali ke jurang resesi dan memunculkan fenomena deflasi secara berkelanjutan.

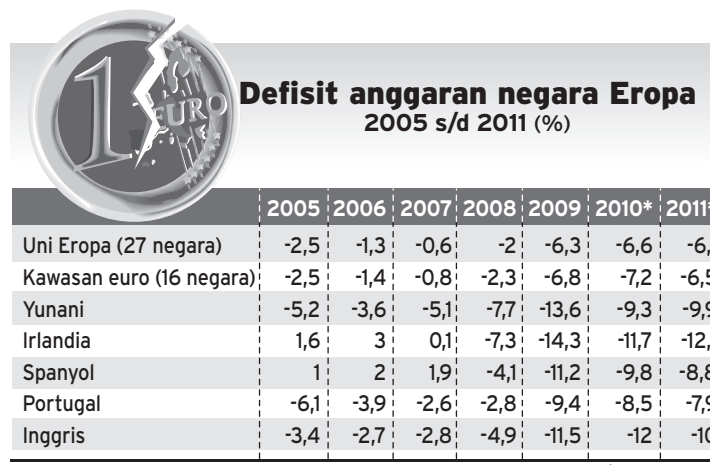
"Kebijakan *exit* untuk tujuan konsolidasi fiskal yang dilakukan terlalu dini dapat menyebabkan *double-dip* (krisis baru) atau bahkan sebuah spiral deflasi, dengan efek rembetan pada angka pengangguran," tulis laporan Badan PBB untuk Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) 2010 yang dirilis kemarin.

Dalam laporan tahunan setebal 204 halaman tersebut, UNCTAD memproyeksikan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) dunia pada tahun ini akan menyentuh 3,5% setelah sempat terkontraksi hampir minus 2% pada 2009.

Pemulihan ekonomi global dinilai masih rapuh dan kecepatannya bervariasi di setiap kelompok negara. Negara-negara *emerging*, terutama Asia dan Amerika Latin, telah memimpin pemulihan. Kelompok negara ini dapat menghindari defisit anggaran yang besar dan mampu mengakumulasi cadangan devisa yang signifikan sebelum krisis.

Di negara transisi Eropa Tengah dan Timur, pemulihan ekonomi telah melemah. Banyak dari mereka telah mengalami defisit neraca transaksi berjalan yang besar dan sangat tergantung pada aliran modal masuk.

Pemulihan juga melambat di



negara maju dan menyerupai kondisi sebelum krisis 2008 dengan ketidakseimbangan dalam perdagangan dan neraca transaksi berjalan global.

Di Amerika Serikat, permintaan domestik telah tumbuh lebih cepat dari negara-negara dengan surplus transaksi berjalan seperti Jepang dan Jerman. Selain itu, persoalan utang publik domestik telah membuat Eropa menjadi pusat krisis dan tertinggal dalam pemulihan ekonomi.

"Kebijakan *exit* dari stimulus di Eropa telah meningkatkan risiko resesi di kawasan itu, atau bah-

kan di dunia. Kegagalan untuk mengkoordinasikan kebijakan di tingkat G-20 juga dapat menyebabkan munculnya kembali ketidakseimbangan global."

Ancaman gagal bayar

Kelompok negara maju, khususnya Eropa, telah berkomitmen untuk menuju konsolidasi fiskal mulai tahun ini. Yang paling menonjol adalah upaya Pemerintah Yunani yang surat utang pemerintahnya tengah berada di bawah ancaman gagal bayar. Yunani menargetkan pemangkasan defisit anggaran dari 13,6% pada 2009 menjadi 8,1% pada tahun ini.

Pekan ini, Komisi Eropa memperkirakan pertumbuhan ekonomi kawasan euro pada kuartal III dan IV akan melemah hingga masing-masing 0,5% dan 0,3% setelah sempat menyentuh 1% pada kuartal II. Secara keseluruhan tahun, pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 1,7%.

Konsolidasi fiskal telah disepakati dalam KTT G-20 di Toronto pada Juni lalu, yakni dengan target pengurangan defisit anggaran sebanyak 50% paling lambat pada 2013 dari level saat ini. Regulator Uni Eropa bahkan beru-

paya untuk menerapkan sanksi yang kredibel bagi negara anggota kawasan tersebut yang melanggar batas maksimal defisit anggaran 3% dari PDB.

Direktur Eksekutif Morgan Stanley Arnaud Mares sebelumnya menuturkan pemerintah di dunia dihadapkan pada kesulitan meningkatkan penerimaan pajak. Potensi resesi bisa makin mengganggu kemampuan pemerintah untuk memungut pajak.

Akibatnya, pemerintah dapat terjerumus ke zona negatif dan meningkatkan risiko di mana pemilik surat utang menderita kerugian yang lebih besar. Apalagi, pemerintah juga dibebani fenomena penuaan populasi.

Standard & Poor's sebelumnya sempat memangkas peringkat surat utang Pemerintah Irlandia bertenor jangka panjang dari AA menjadi AA-. Menurut proyeksi S&P, rasio utang Pemerintah Irlandia akan melonjak hingga 113% dari produk domestik bruto (PDB) pada 2012, atau 1,5 kali lipat dari rata-rata kawasan euro.

Untuk negara lain seperti Belgia dan Spanyol, rasio utang diperkirakan 98% dan 65% dari PDB pada tahun yang sama. (*devi.astuti@bisnis.co.id*)



BISNIS/PAULUS TANDI BONE

PENDAPATAN NEGARA: Dua wajib pajak menyelesaikan kewajibannya di Kanwil Pajak Sulsei, beberapa waktu lalu. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara mengatakan realisasi pendapatan dan hibah negara hingga 7 September tercatat Rp626,7 triliun atau 63,2% dari target APBN-P 2010. Adapun, belanja negara baru sebesar 52,4% dari pagu Rp1.126,14 triliun.

2 Seri obligasi valas terbit awal 2011

OLEH AGUST SUPRIADI
Bisnis Indonesia

JAKARTA: Pemerintah kembali akan menggenjot penarikan pembiayaan dari pasar pada awal tahun, atau *front loading strategy*, dengan mengagendakan penerbitan dua seri obligasi berdenominasi valas di semester I/2011.

Rahmat Waluyanto, Direktur Jenderal Pengelolaan Utang, menuturkan waktu yang tepat dan potensial untuk menarik pendanaan dari pasar adalah pada paruh pertama setiap tahunnya. Untuk itu, salah satu sumber pembiayaan defisit tahun depan akan diupayakan dengan menerbitkan sukuk global dan *global bond* pada semester I.

"Kedua penerbitan sukuk itu pada semester I/2011. Namun, untuk pengaturannya akan kita lihat pengaturannya seperti apa," tuturnya, kemarin.

Rahmat tidak mengkhawatirkan terjadinya *crowding out* (jatuh tempo obligasi yang menumpuk) dengan strategi pemerintah menggenjot penerbitan di awal tahun, karena skenario tersebut telah memperhatikan jarak penerbitan dan jumlah penarikan dananya.

Investor Timur Tengah

Menurut dia, penerbitan sukuk global pada tahun depan akan lebih banyak menasar ke investor-investor asal kawasan Timur Tengah, Asia, dan Eropa. Sementara untuk obligasi valas konven-

sional (*global bond*) diharapkan merangsang investor asal Asia, Eropa dan Amerika untuk membelinya.

"Jadi cuma itu penekanannya. Kalau untuk sukuk (global) ya ke Timur Tengah, tapi tidak menutup kemungkinan ke Amerika yang juga jumlahnya banyak sekitar 30%. Tapi umumnya untuk setiap investor," jelas dia.

Menteri Keuangan Agus D. W. Martowardojo sebelumnya merencanakan penarikan pembiayaan maksimal Rp6 triliun melalui penerbitan obligasi negara berdenominasi yen (Samurai Bond) pada penghujung tahun ini.

Pihaknya sudah membuat estimasi target indikatif dari penerbitan samurai bond di kuartal IV/2010 antara Rp3 triliun hingga Rp6 triliun. Bahkan pemerintah telah menunjukkan sejumlah perusahaan sebagai penjamin resmi (*arranger*) Samurai Bond.

"Kita mungkin ambil (pembiayaan dari penerbitan samurai bond) antara Rp3 triliun-6 triliun. Itu ekuivalen ya," tuturnya belum lama ini.

Seperti diketahui, pemerintah telah mengantongi komitmen pinjaman siaga dari Japan Bank International Corporation (JBIC) sebesar US\$1,5 miliar untuk 2009-2010.

Pinjaman siaga tersebut diberikan dalam bentuk penjaminan atas penerbitan obligasi negara di pasar Jepang melalui skema MASF (Market Access Support Facility).

Murdoch terpaksa jual Fiji Times

AP

SYDNEY: News Ltd milik Rupert Murdoch akan menjual perusahaan surat kabar utama Fiji untuk memenuhi peraturan baru mengenai kepemilikan asing yang dikeluarkan oleh pemerintah militer yang dinilai mengikat kebebasan media. News Ltd, yang merupakan satu cabang dari kerajaan media global milik Murdoch, kemarin mengumumkan telah membuat kesepakatan untuk menjual *Fiji Times* kepada pengusaha Fiji bernama Mahendra Motibhai Patel.

Pemerintah Fiji yang didominasi militer mengeluarkan peraturan baru pada Juni yang mengharuskan perusahaan surat kabar menjadi saham 90% kepemilikan saham dipegang oleh warga Fiji dalam tenggat 3 bulan atau terpaksa harus ditutup.

Peraturan itu merupakan salah satu cara untuk mengikat media yang dikeluarkan oleh Komodor Frank Bainimarama, yang merebut kekuasaan dengan kudeta pada

2006 dan telah memasang sensor di kantor televisi, surat kabar dan radio utama untuk membatasi kritik terhadap pemerintahannya. Wartawan dan manajer media asing telah dikeluarkan, dan puluhan jurnalis lokal ditahan dan diinterogasi.

"Kami enggan menjual *Fiji Times*, tetapi saya senang kami telah mampu menemukan pembeli yang akan mengambil alih usaha sebagai sebuah kelangsungan, menghor-

mati pendahulu dan berinvestasi di masa depan," kata CEO News Ltd John Hartigan.

Penjualan Pacific Publications (Fiji) Ltd ke Motibhai & Co Ltd harus disetujui oleh regulator di Fiji dan diharapkan akan selesai pada 22 September, demikian pernyataan tersebut.

Patel merupakan seorang direktur noneksekutif dari *Fiji Times*. Dia salah satu pendiri dari Motibhai Group, yang menurut situs webnya merupakan usaha ragam dengan fokus impor, ritel dan perumahan komersial.

Motibhai mengatakan bahwa

Fiji Times akan beroperasi sebagai unit mandiri dari grup itu, dan pemilik baru akan berupaya untuk memastikan surat kabar tersebut masih menjadi yang paling diandalkan oleh kebanyakan masyarakat Fiji.

Bainimarama tahun lalu menuduh *Times* dan *Fiji TV*, stasiun televisi terbesar di negara itu, karena dianggap "jahat" dan penuh prasangka karena tidak menghormati pemerintah.

News Ltd dan Motibhai tidak menyebut pemerintah dalam pernyataan bersama mereka yang keluar hari Rabu. (T04/MRP)